

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Perkembangan budaya politik keraton telah masuk ke dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui simbol-simbol wayang, aturan-aturan, sistem kerja, budaya pemerintahan Satriya, dan birokratisasi *abdi dalem*. Reformasi birokrasi yang berbasiskan pada momentum Keistimewaan dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni filosofis *hamemayu hayuning bawana* dan ajaran moral yakni *sawiji, greget, sengguh ra mingkuh* serta dengan semangat *golong gilig*, filosofis Jawa yang berhubungan dengan Kasultanan dan Kadipaten.
 2. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta didesain dengan momentum Keistimewaan. Dengan melakukan penataan dan mekanisme tata kerja pemerintahan berbasis keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandai dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Faktor pendukung reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pertama* faktor internal disebabkan oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan momentum Kesitumewaan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan reformasi birokrasi. *Kedua*, faktor ekternal disebabkan oleh keberadaan dan kedudukan juga status Kasultanan

dan Kadipaten yang memiliki pengaruh bagi perkembangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor penghambat reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta penghambat *Pertama*, faktor internal masih belum efektifnya beberapa organisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan urusan pemerintahan. *Kedua*, faktor eksternal disebabkan oleh produk hukum lokal yang lama dalam pengesahannya.

5.2 Saran

1. Dengan adanya budaya politik keraton yang masuk ke dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta hendaklah dijadikan sebagai landasan dalam bekerja karena jika Pemerintahan Daerah menganut sistem kerajaan, maka segala urusan pelayanan publiknya tidak akan berbelit-belit. Ini merupakan kesempatan yang bagus, akan tetapi sewajarnya saja, mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 2. Road Map reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bagus karena tidak hanya mengikutsertakan nilai-nilai kearifan lokal, akan tetapi juga mengikutsertakan nilai-nilai umum di dalamnya. Sehingga, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengayomi masyarakat juga melindungi nilai-nilai sejarah dalam Daerah Istimewa Yoyakarta.
 3. Faktor pendukung dan penghambat hendaknya harus lebih diperketat kembali supaya tidak banyak aspek yang diubah kembali. Penegasan-penegasan budaya

satriya juga harus diperhatikan karena budaya satriya sudah merupakan budaya pemerintahan yang baik dan tidak dimiliki oleh Pemerintahan Daerah lainnya.